

Percepat Realisasi Anggaran DD Tahun 2020, Dinas PMD Ikuti Vidcon

Dalam rangka mendukung pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana instruksi Presiden, BPKAD dan Dinas PMD khususnya wilayah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah yang mengkoordinasikan penyaluran DD diharapkan dapat segera mempercepat realisasi anggarannya. Dinas PMD melalui Bidang pembangunan dan Pemerintahan Desa pada Kamis 13 Agustus 2020 mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan realisasi DD Tahun 2020 melalui vidcon, kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Agenda dalam vidcon kali ini mengenai Rapat Pembahasan Percepatan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi PMK 101 Tahun 2020. Rapat ini dipimpin oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Ratih Hapsari Kusumawardani dan diikuti oleh Kepala BPKAD dan Dinas PMD se-Kalimantan Tengah serta KPPN Palangka Raya, Buntok, Sampit dan Kobar.

Ratih Hapsari dalam sambutannya mengatakan” Adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap naiknya kemiskinan serta membeludaknya angka pengangguran. Maka guna menunjang perekonomian, Pemerintah membuat kebijakan *extraordinary* dengan menjaga perkembangan pertumbuhan perekonomian serta percepatan penyaluran Dana Desa yang merupakan alat Pemerintah untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan karena dampak pandemi. Covid-19.”

Dalam sosialisasi PMK 101/2020 khususnya Tentang penyaluran Dana Desa, Dana Desa tahun 2020 digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp. 300.000/KPM untuk bulan ke empat sampai ke enam. Dalam hal Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50%. Pemotongan dikecualikan terhadap pemerintah Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. Ada perubahan yang mendasar apabila dibandingkan dengan PMK No. 50/PMK.07/2020. Kalau di PMK N0. 50 Tahun 2020 bagi Desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan penyaluran BLT-DD tidak disalurkan Dana Desa Tahap III tahun 2020, tetapi dengan adanya PMK No. 101 tahun 2020 pemotongan akan dilakukan pada penyaluran DD Tahap II tahun 2021 sebesar 50%.

Selanjutnya di sesi diskusi, terutama terhadap kinerja penyaluran Dana Desa baik mengenai kendala dan progres yang telah dilakukan oleh masing-masing Instansi. Dinas PMD melalui Kabid Pembangunan dan Pemerintahan Desa Drs. Sudiharto menyampaikan “ Capaian Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap penyaluran DD Tahap I dan Tahap II sudah 100% dari 81 Desa, Untuk BLT-DD Tahap I dan Tahap II sudah teralurkan 100%. Sedangkan Penyaluran BLT-DD Tahap III sudah terealisasi 79 Desa dari 81 Desa. Terdapat 2 Desa yang belum salur, hal ini dikarenakan adanya bencana banjir yang menimpa beberapa Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat”terang Sudiharto.

Sudiharto juga menambahkan “Persiapan penyaluran DD Tahap III Dengan terbitnya PMK 101 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2020 merupakan sebuah bentuk angin segar karena pada peraturan sebelumnya PMK N0 50/PMK.07/2000 mensyaratkan realisasi output maupun keuangan harus mencapai minimal 50% sekarang tidak ada lagi, hal ini mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III”. Untuk diketahui bahwa Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Data OMSPAN per 13 Agustus 2020 mendapatkan apresiasi yang membanggakan. Kobar menjadi garda terdepan penyaluran Dana Desa se-Povoninsi Kalimantan Tengah dengan total penyaluran 80,4%, ini merupakan sebuah prestasi yang harus ditingkatkan.